



SUB BAGIAN HUMAS DAN TU KALAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI
SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 54. Padang 25137 Tlp. 0751-40818 Fax 0751-40811.40817

Koran	Hlm	
Haluan		
Padang Ekspres		
Singgalang		
Posmetro	✓	8
.....		

Tahun: 2017	
Bulan:	
Jan	Jul
Feb	Agust
Maret	Sep
April	Okt
Mei	Nov
Jun	✓ Des

Tanggal				
1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25
26	27	28	29	30
31				



BUPATI Pesisir Selatan H Hendrajoni menerima hasil pemeriksaan LKPD dari kepala BPK Perwakilan Sumbar.



BUPATI Pesisir Selatan H Hendrajoni berfoto bersama Ketua DPRD Pessel Dedi Rahmanto Putra, Sekda Pessel, Ir Erizon.



HENDRA JONI berfoto bersama dengan kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat.

Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Apresiasi Pessel Raih Lagi WTP



HENDRA JONI berfoto bersama dengan kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat.

kilang BPK Sumbar Elida pada waktu bersamaan juga menyerahkan LHP Kab. Pasbar, Kota Padang Panjang dan Kota Sawahlunto yang juga mendapat nilai WTP. "Saya mengapresiasi Kab. Pessel dan

Kota Sawahlunto yang mempertahankan WTP, dan Padang Panjang serta Pasaman Barat yang mampu meningkatkan penilaian menjadi WTP" sebut Elida, Jumat, 2 Juni 2017, di Aula BPK Sumbar.

Keberhasilan Pessel mempertahankan WTP ke empat kalinya menurut Elida merupakan komitmen serius pemerintah setempat dalam menyajikan laporan keuangan yang berbasis akrual.

"Kami berharap kedepan terus dilakukan pembenahan sehingga makin baik dan sempurna" ujarnya. Sementara itu, Ali Yusuf, Walikota Sawahlunto yang didaulat mewakili

para kepala daerah berharap BPK terus melakukan pembinaan terutama atas sajian laporan keuangan yang makin akuntabel.

"Kita berharap mari dukung kami, untuk membangun daerah masing-masing guna mensejahterakan masyarakat" sebutnya.

Sementara itu, Bupati Pessel Hendrajoni mengakui bahwa keberhasilan Pessel meraih opini WTP yang keempat kali merupakan kerja seluruh OPD dan stokeholder yang terus berbenah.

"Komitmen kita membangun Pessel yang mandiri, unggul, agamis dan sejahtera, akan terwujud" ujarnya.

WTP merupakan opini tertinggi yang diberikan oleh BPK yang melakukan pemeriksaan atas sajian Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Opini berikutnya Wajar Dengan Pengucualian (WDP), Tidak Memberi Penilaian dan Disclaimer. Dan, Hendrajoni berharap kepada OPD "OPD yang ada bisa menggunakan keuangan sesuai aturan dan keperluan kegiatan di setiap OPD. (m)



BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat kembali menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD TA 2016 kepada Pemerintahan Kabupaten Pessel, dengan penilaian Wajar Tanpa Pengucualian (WTP). Kepala Perwa-

BUPATI Pessel Hendra Joni menerima WTP dari BPK RI perwakilan Sumbar. Disaksikan Ketua DPRD Pessel Dedi Rahamanto Putra.

